

Manajemen Akreditasi di MIN 2 Kota Palangka Raya

Fadilatur Rahman^{1*}, Sapuadi², Slamet Riyadi³

^{1,2,3}Universitas Islam Negeri Palangka Raya, Kalimantan Tengah, Indonesia

Email: dhilfr17@email.com

Email Penulis Korespondensi: dhilfr17@email.com

Abstrak– Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan perencanaan dan pelaksanaan manajemen akreditasi di MIN 2 Kota Palangka Raya. Latar belakang penelitian didasarkan pada pentingnya akreditasi sebagai upaya penjaminan mutu pendidikan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan (SNP) yang meliputi delapan standar. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, dengan sumber data utama kepala sekolah, wakil kepala, guru, serta dokumen akreditasi madrasah. Penelitian ini berfokus pada perencanaan dan pelaksanaan akreditasi yang dilakukan oleh MIN 2 kota palangka raya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perencanaan akreditasi di MIN 2 Kota Palangka Raya dilakukan melalui penyusunan program berbasis standar akreditasi, pembentukan tim akreditasi, serta pemenuhan instrumen dan bukti fisik. Pelaksanaan akreditasi dilaksanakan secara sistematis melalui evaluasi diri sekolah, pemenuhan instrumen, hingga visitasi oleh asesor. Madrasah ini berhasil memperoleh akreditasi UNGGUL (A), yang menunjukkan manajemen akreditasi telah berjalan efektif. Temuan ini menegaskan bahwa manajemen akreditasi yang baik tidak hanya meningkatkan mutu pendidikan, tetapi juga memperkuat akuntabilitas publik dan daya saing lembaga pendidikan.

Kata Kunci: Manajemen, Akreditasi, Manajemen Akreditasi

Abstract– This study aims to describe the planning and implementation of accreditation management at MIN 2 Palangka Raya City. The background of this research is based on the importance of accreditation as an effort to ensure the quality of education in accordance with the National Education Standards (SNP), which include eight standards. This research employs a qualitative approach with a descriptive method. Data were collected through interviews, observations, and documentation, with primary sources including the principal, vice principals, teachers, and accreditation documents of the madrasah. The findings reveal that the accreditation planning at MIN 2 Palangka Raya City is carried out through program design based on accreditation standards, the formation of an accreditation team, and the fulfillment of instruments and supporting evidence. The implementation of accreditation is conducted systematically through school self-evaluation, instrument completion, and visitation by assessors. The madrasah successfully achieved an excellent (A) accreditation rating, indicating that its accreditation management has been effectively implemented. These findings highlight that effective accreditation management not only enhances the quality of education but also strengthens public accountability and the competitiveness of educational institutions.

Keywords: Management, Accreditation, Accreditation Management

1. PENDAHULUAN

Dunia pendidikan merupakan salah satu cara untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dimana dalam dunia pendidikan merupakan tempat pembinaan dan pembelajaran manusia agar menjadi manusia seutuhnya yang dapat menggunakan akal pikirannya untuk kemajuan yang tentunya harus sesuai dengan norma dan nilai-nilai luhur yang baik. Dalam bidang pendidikan saat ini harus mengalami kemajuan karena harus menyesuaikan dengan perkembangan zaman sehingga ada relevansi antara dunia pendidikan dengan perkembangan zaman. Dalam kondisi sekarang bahwa pendidikan Indonesia masih jauh tertinggal dibandingkan dengan beberapa negara lain di dunia, oleh karena itu mutu pendidikan di Indonesia harus segera diupayakan agar segera ditingkatkan agar bisa sejajar dengan negara-negara lain di dunia. Sekolah dalam hal peningkatan mutu pendidikan merupakan ujung tombak negara untuk penyelenggaraan pendidikan yang sesuai dengan aturan dan nilai-nilai moral yang baik.

Sekolah yang merupakan ujung tombak dan bagian dari sistem pendidikan nasional diuntut untuk selalu meningkatkan kualitas dalam penyelenggaraan pendidikan, proses pendidikan yang berkualitas tentunya akan menghasilkan lulusan yang berkualitas [1]. Berdasarkan [2] Bagian Penjelasan dinyatakan bahwa “salah satu strategi pembangunan nasional melalui evaluasi, akreditasi, dan sertifikasi pendidikan yang memberdayakan”. Adanya akreditasi sekolah dapat memetakan mutu pendidikan berdasarkan Standar Nasional Pendidikan serta menjadi acuan dalam upaya peningkatan mutu dan rencana pengembangan sekolah/madrasah.

Ketika suatu satuan pendidikan yang menginginkan outputnya bermutu, satuan tersebut juga harus memberikan sesuatu pembaharuan pendidikan yang terus-menerus agar nantinya bisa menghadapi berbagai tantangan sesuai dengan perkembangan. Karena pembaharuan kualitas sekolah dapat dilihat dari berbagai segi manajemen sekolah. Selain itu kualitas sekolah juga dipengaruhi oleh beberapa faktor baik dari sekolah itu sendiri maupun dari luar sekolah.[3]. Banyak faktor kendala yang dihadapi madrasah belum terakreditasi. diantaranya bagi pemerintah proses akreditasi madrasah tidak bisa dilakukan bersamaan tetapi dilakukan secara bertahap sesuai dengan dana yang dianggarkan sehingga pengajuan akreditasi harus menunggu daftar tunggu.[4]

Dalam satuan pendidikan, akreditasi memiliki beberapa manfaat :1). Pedoman dalam meningkatkan mutu pendidikan dan rancangan pengembangan pendidikan, 2). Sebagai panduan untuk pemberdayaan warga sekolah, 3). Sebagai bahan untuk mendapatkan dukungan dari pemerintah dan swasta dari sector dana dan dukungan tenaga profesionalisme.[5]. Di samping itu, hasil akreditasi juga diperlukan kepala sekolah/madrasah sebagai bahan

masukannya untuk penyusunan program serta anggaran pendapatan dan belanja sekolah/madrasah.[6] Peningkatan mutu disetiap satuan pendidikan atau sekolah, diarahkan pada upaya terselenggaranya layanan pendidikan kepada pihak yang berkepentingan atau masyarakat. Dalam upaya peningkatan mutu pendidikan nasional secara bertahap kearah yang dimaksudkan sesuai dengan peraturan Undang-Undang nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, harus dilakukan pengembangan dan sekaligus pembangun sistem pengendalian mutu pendidikan melalui empat program yang terintegrasi, yaitu : standarisasi pendidikan, evaluasi mutu sekolah, akreditasi sekolah dan sertifikasi peningkatan mutu pendidik. Penyusunan Instrumen Akreditasi baru merupakan sebuah kebutuhan mendesak mengingat dinamika pendidikan telah banyak mengalami perubahan. Perlunya penyusunan instrumen baru ini karena BAN-S/M akan menerapkan pendekatan baru dalam penilaian akreditasi Sekolah/Madrasah dari penilaian berbasis administrasi (compliance) menuju penilaian berbasis kinerja (performance based) atau dari rules to principles[7]

Akreditasi merupakan proses untuk menilai kinerja terhadap kelayakan program yang terdapat dalam satuan pendidikan. Proses peningkatan mutu pendidikan dapat dilakukan dengan akreditasi sekolah. Akreditasi sekolah ini merupakan proses penilaian kelayakan sekolah. Dalam [8] menjelaskan bahwa Akreditasi Sekolah menjelaskan bahwa tujuan akreditasi adalah untuk memperoleh gambaran kinerja dan tingkat kelayakan suatu sekolah dalam menyelenggarakan pendidikan yang diwujudkan dalam predikat atau status sekolah yang diharapkan dapat meningkatkan mutu pendidikan. Oleh karena itu suatu peningkatan kualitas layanan yang terdapat dalam satuan pendidikan bisa tercapai dengan memperhatikan program-program yang sudah ditetapkan dalam kebijakan akreditasi yang nantinya mampu memberikan kualitas yang bermutu. Untuk meningkatkan mutu Pendidikan maka diperlukannya suatu manajemen yang baik karena dengan adanya manajemen, sekolah bisa menghasilkan suatu Pendidikan yang bermutu.

Berdasar SK. Menteri Agama RI Nomor 515. A/1995 tanggal 25 Nopember 1995 resmi berdiri sendiri dengan nomor statistik bangunan (NSB) 00111727806702. Seiring dengan diakuinya Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) Pahandut berdiri sendiri dan berkembang dengan sangat pesat. Berdasarkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 672 Tahun 2016 dan Surat Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 2068/Kw.15.2/2-e/PP.00.02/07/2017 tanggal 05 Juli 2017 yang semula Madrasah Ibtidaiyah Negeri Pahandut Palangka Raya berubah menjadi Madrasah Ibtidaiyah Negeri 2 Kota Palangka Raya. Pada tahun 2022 MIN 2 Kota Palangka Raya mendapat predikat akreditasi UNGGUL (A) dari Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah. Akreditasi yang baik akan sangat berpengaruh pada sekolah/madrasah itu sendiri. Maka dari itu peneliti tertarik untuk meneliti mengenai manajemen akreditasi yang dilakukan oleh MIN Kota Palangka Raya.

Penelitian ini bermaksud untuk mendeskripsikan Manajemen akreditasi di MIN 2 Kota Palangka Raya. Tujuan penelitian ini yaitu untuk melihat bagaimana Perencanaan dan Pelaksanaan Akreditasi yang dilakukan oleh MIN 2 Kota Palangka Raya sehingga Madrasah tersebut memperoleh Akreditasi UNGGUL.

2. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu, pendekatan yang fokus pada pemahaman dan deskripsi fenomena secara mendalam komprehensif [9]. Penelitian ini memanfaatkan data primer dan sekunder yang relevan untuk menggambarkan dan mendeskripsikan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan akreditasi di MIN 2 Kota Palangka raya. Adapun kegiatan observasi berguna untuk Mempelajari mana diantara butir-butir instrumen yang memerlukan observasi, Menentukan apa yang akan menjadi fokus dalam observasi, Tentukan bagaimana anda akan mencatat keadaan atau kegiatan yang diobservasi, Menentukan perilaku apa saja yang akan menjadi target observasi, Menentukan kegiatan-kegiatan apa saja yang akan diobservasi, Memperkirakan berapa lama waktu yang akan diperlukan untuk observasi setiap keadaan atau kegiatan. Proses wawancara adalah proses penggalan data dengan melakukan wawancara terhadap pihak yang terkait. Sedangkan proses angket dilakukan secara online dengan menggunakan sarana yang telah disediakan oleh BAN S/M. Setelah semua data tersanding maka asesor melakukan Proses Triangulasi, melakukan cross check data dan melakukan Professional Judgment untuk akhirnya merangkum data untuk satu butir.[10]

2.1 Desain Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan desain penelitian kualitatif yang berfokus pada deskripsi mendalam mengenai perencanaan dan pelaksanaan Akreditasi. Peneliti berperan sebagai pengamat aktif dan pengumpul data, melakukan observasi langsung, wawancara, dan analisis dokumen untuk memperoleh informasi yang komprehensif tentang perencanaan dan pelaksanaan Akreditasi di MIN 2 Kota Palangka raya.

2.2 Lokasi dan Subjek Penelitian

Penelitian ini dilakukan di MIN 2 Kota Palangka Raya, sebuah Instansi Pendidikan yang ada di Kota Palangka raya, Kalimantan Tengah. Subjek dalam penelitian ini terdiri dari Kepala Madrasah MIN 2 Kota Palangka Raya, Wakil Kepala Madrasah MIN 2 Kota Palangka Raya, Tim akreditasi.

2.3 Teknik Pengumpulan Data

a. **Observasi**, dalam pendekatan kualitatif deskriptif, observasi dilakukan di ruang Kepala Madrasah untuk melihat perencanaan akreditasi dan di Guru untuk mengumpulkan data langsung mengenai proses pelaksanaan akreditasi.



- b. **Wawancara**, wawancara yang dilakukan yaitu wawancara semi-terstruktur. Wawancara ini dalam pelaksanaannya lebih fleksibilitas dan terbuka kepada informan mengenai pendapat serta idenya. Metode wawancara semi-terstruktur bertujuan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan narasumber, agar memperoleh keterangan yang spesifik dan mendalam yang tidak dapat diketahui melalui observasi. Adapun wawancara yang dilakukan yaitu kepada Kepala Madrasah MIN 2 Kota Palangka Raya, Wakil Kepala Madrasah Kurikulum MIN 2 Kota Palangka Raya, dan Tim akreditasi.
- c. **Analisis Dokumentasi**, data juga dikumpulkan melalui analisis dokumen terkait perencanaan dan pelaksanaan akreditasi, seperti laporan kegiatan, RAB perencanaan, dan dokumen lain yang bisa di dimanfaatkan untuk penelitian.

2.4 Prosedur Penelitian

- a. **Persiapan**, peneliti melakukan persiapan dengan mengidentifikasi Kepala Madrasah dan Tim akreditasi yang terlibat dalam kegiatan akreditasi sekolah. Instrumen penelitian, seperti panduan observasi dan daftar pertanyaan wawancara.
- b. **Pengumpulan Data**, peneliti melakukan observasi di ruang Kepala Madrasah dan di Ruang Guru, setelah itu dilanjutkan dengan wawancara kepada kepala madrasah, wakamad kurikulum dan tim akreditasi secara berurutan. Data yang diperoleh dari observasi dan wawancara dicatat dan direkam untuk analisis lebih lanjut. Dokumen terkait juga dikumpulkan dan dianalisis untuk mendukung data yang diperoleh dari observasi dan wawancara.
- c. **Analisis Data**, data yang dikumpulkan dianalisis secara kualitatif. Peneliti mengidentifikasi tema-tema utama yang muncul dari data observasi, wawancara, dan dokumen. Temuan-temuan ini kemudian disusun dalam bentuk naratif untuk menggambarkan perencanaan dan pelaksanaan akreditasi di MIN 2 Kota Palangka Raya.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Perencanaan Akreditasi di MIN 2 Kota Palangka Raya

Akreditasi merupakan kegiatan penilaian kelayakan program dan/atau satuan pendidikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. Dalam rangka menerapkan pengawasan dan evaluasi untuk mendapatkan pemetaan terhadap mutu pendidikan di Indonesia, maka pemerintah atau lembaga, serta lembaga mandiri yang ditunjuk dan memiliki kewenangan untuk menentukan kelayakan/ program dari satuan pendidikan baik formal maupun non formal yang berdasarkan kepada aturan dan standar yang telah ditetapkan. Hal ini merupakan salah satu bentuk pertanggung jawaban pendidikan kepada public dengan penerapan yang secara objektif, adil, transparan dan menyeluruh.[11].

Proses akreditasi satuan pendidikan juga memiliki manfaat bagi pemerintah daerah. Dengan adanya akreditasi satuan lembaga pendidikan, pemerintah daerah juga mendapatkan gambaran mutu pendidikan di daerah tersebut, sehingga akreditasi dapat dijadikan acuan dalam pengambilan kebijakan dan keputusan bagi pemerintah daerah. Hasil akreditasi selalu mendorong untuk meningkatkan diri dan bekerja keras dalam memberikan layanan mutu terbaik bagi pengguna satuan pendidikan di daerah tersebut.[12].

Berdasarkan yang tercantum dalam (Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 63 Tahun 2009 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan, 2009) menegaskan adanya kebijakan peningkatan mutu di sekolah dapat dilakukan dengan proses akreditasi. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah dalam akreditasi perlu disiapkan karena memiliki makna penting dalam membangun bangsa [14].

Proses perencanaan akreditasi sekolah dimulai dengan pembentukan tim, sosialisasi, evaluasi dan pengumpulan dokumen secara menyeluruh, diikuti dengan implementasi kegiatan, lalu simulasi dilanjutkan dengan pengisian data melalui aplikasi Sispena sebelum asesmen dilakukan, dan berlanjut ke monitoring dengan asesor, vistasi untuk validasi kinerja, hingga akhirnya pengumuman dan penerbitan sertifikat hasil akreditasi dan tindak lanjut pasca Vistasi.[15] .

Tabel 1. Perencanaan awal untuk proses akreditasi di MIN 2 Kota Palangka Raya :

- | |
|---------------------------------------|
| 1. Pembentukan tim Akreditasi |
| 2. Sosialisai Akreditasi |
| 3. Evaluasi diri dan kesiapan |
| 4. Pengumpulan dan penyusunan dokumen |

Dari tabel 1 diatas berikut tahapan yang terjadi di MIN 2 Kota Palangka Raya :

- a. Perencanaan Akreditasi MIN 2 Kota Palangka Raya ini dimulai dari kepala madrasah mengadakan rapat dengan dewan guru untuk pembentukan tim dan bagian nya sesuai dengan bidang yang dikuasai dewan guru. Kepala Madrasah disini memiliki peran sebagai pegawai tim akreditasi MIN 2 Kota Palangka Raya.
- b. Dewan guru MIN 2 Kota Palangka raya memberikan sosialisai kepada elemen-elemen yang berkaitan dengan sekolah/madrasah seperti para siswa maupun lingkungan madrasah. Dengan setiap dewan guru yang mengajar untuk memberi kn pemahaman terhadap murid di setiap kelas nya, apasaja yang harus di lakukan pada saat proses Akrediatasi berlangsung.



- c. Saling mengevaluasi terdapat kelebihan, kekurangan, peluang dan tantangan yang akan di hadapi dalam proses Akreditasi Sekolah Madrasah. Dalam hal ini Kepala madrasah memiliki peran melakukan pengecekan terhadap dewan guru yang terlibat, apakah yang mereka harus siapkan sudah tersedia, dan dewan guru juga melakukan laporan secara rutin jika ada sesuatu yang kurang dalam persiapan Akreditasi.
- d. Dilanjutkan dengan pengumpulan dan penyusunan dokumen MIN 2 Kota Palangka Raya yang akan diperlukan dalam proses Akreditasi. Dokumen yang di siapkan akan di kumpulkan kepada kepala madrasah dan dewan guru yang terlibat harus menguasai tentang dokumen tersebut.

Perencanaan tersebut bahkan dilakukan 2 bulan sebelum jadwal proses Akreditasi dimulai, hal ini yang membuat madrasah sudah ada kesiapan dalam proses Akreditasi dan membuahkan hasil yang memuaskan dengan memperoleh nilai UNGGUL (A).

3.2 Pelaksanaan Akreditasi di MIN 2 Kota Palangka Raya

Dalam proses pelaksanaan sekolah/madrasah dalam mekanisme pelaksanaan akreditasi sekolah, sebelum mengajukan permohonan akreditasi, sekolah harus melakukan evaluasi diri sekolah (EDS) terlebih dahulu dengan mengisi instrumen EDS yang di terbitkan oleh BSN kemudian tim dan BAN-SM akan melaksanakan visitasi untuk melihat kecermatan dan kesesuaian dengan data yang diperoleh dari pengisian evaluasi diri.[16]. Kebijakan akreditasi yang dilaksanakakan oleh madrasah sepatutnya dilakuakn evaluasi. Evaluasi dalam implementasi kebijakan akrditasi di madrasah umumnya saat madrasah mendapatkan status akreditasi yang diberikan oleh Badan Akreditasi. Sekolah sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional dituntut untuk selalu berupaya meningkatkan kualitas dalam penyelenggaraan pendidikan, hingga dapat menghasilkan lulusan yang berkualitas, mampu bersaing serta mampu menghadapi tantangan zaman. Salah satu program pemerintah yang sedang dilaksanakan sekarang adalah meningkatkan mutu pendidikan secara nasional. Bagi kepala sekolah/madrasah, hasil akreditasi diharapkan dapat dijadikan bahan informasi untuk pemetaan indikator kelayakan mutu sekolah/madrasah, kinerja warga sekolah/madrasah, termasuk kinerja kepala sekolah/madrasah selama periode kepemimpinannya.

Dari hasil tersebut tentunya pihak madrasah memiliki kepentingan yang kuat untuk menjadikan predikat akreditasi sebagai bentuk alat evaluasi kebijakan madrasah secara menyeluruh. Sehingga tindakan tersebut sesuai dengan teori evaluasi kebijakan, di mana evaluasi kebijakan adalah kegiatan yang menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan yang mencakup substansi, implementasi dan dampak akreditasi.[17]. Manajemen satuan pendidikan tentunya membutuhkan monitoring dan evaluasi dengan bertujuan agar proses yang sedang dilakukan dapat dilaksanakan dengan baik serta untuk mengetahui memiliki progress atau tidak. Manajemen akreditasi sekolah merupakan suatu langkah dari satuan pendidikan dalam usaha meningkatkan kualitas akreditasi dari satuan pendidikan tersebut.[18]

Pelaksanaan akreditasi di MIN 2 Kota Palangka Raya :

1. Pendaftaran melalui aplikasi **Sispena (Sistem Penilaian Akreditasi)**. Dewan guru yang terlibat dalam tim wajib mengetahui bagaimana sistem ini.
2. MIN 2 Kota Palangka Raya mengisi evaluasi diri sesuai instrumen akreditasi. Tujuannya untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan madrasah, serta kesiapan sebelum penilaian oleh asesor. Kepala madrasah memberikan masukan kepada tim agar memiliki kesiapan yang matang ketika proses akreditasi.
3. Tim BAN-S/M melakukan desk evaluation (penilaian dokumen yang diunggah di Sispena). Hasil verifikasi akan menentukan apakah sekolah layak untuk lanjut ke tahap visitasi.
4. BAN-S/M menunjuk tim asesor (biasanya 2 orang) untuk melaksanakan visitasi ke MIN 2 Kota Palangka Raya. Dan Jadwal visitasi diinformasikan kepada madrasah. Persiapan yang matang pasti akan membuahkan hasil yang memuaskan.
5. Visitasi biasanya berlangsung 2–3 hari dengan kegiatan:
 - a) **Observasi**: meninjau proses pembelajaran, sarana prasarana, kegiatan madrasah.
 - b) **Wawancara**: dengan kepala madrasah, guru, siswa, komite, dan tenaga kependidikan.
 - c) **Verifikasi dokumen**: mengecek kesesuaian bukti fisik dengan dokumen yang diunggah.
 - d) **Konfirmasi data**: memastikan data yang ada sesuai dengan kondisi nyata di lapangan.
6. Setelah visitasi, **asesor** melakukan **validasi dan penyusunan laporan hasil akreditasi MIN 2 Kota Palangka Raya**. Laporan ini diserahkan ke BAN-S/M provinsi untuk ditelaah lebih lanjut.
7. BAN-S/M melakukan rapat pleno untuk menentukan **peringkat akreditasi: A (Unggul), B (Baik), C (Cukup), Tidak Terakreditasi** (jika tidak memenuhi syarat). Dalam hal ini MIN 2 Kota Palangka Raya mendapatkan nilai A (UNGGUL).
8. MIN 2 Kota Palangka Raya yang telah dinyatakan lulus akreditasi akan memperoleh **sertifikat Akreditasi** Pada tanggal 03 November 2022 yang berlaku **5 tahun**. Dan Sertifikat dapat diunduh melalui **Sispena** (Sistem Penilaian Akreditasi).
9. MIN 2 Kota Palangka Raya menggunakan hasil akreditasi sebagai **bahan evaluasi dan perbaikan mutu berkelanjutan**. BAN-S/M atau Dinas Pendidikan dapat melakukan pembinaan lebih lanjut bagi madrasah yang mendapat nilai rendah.

Dalam sistem akreditasi, mutu satuan pendidikan ditentukan oleh faktor-faktor yang saling berhubungan satu dengan lainnya meliputi standarisasi proses dan pengelolaan pendidikan, penjaminan mutu, evaluasi dan akreditasi.



Umpan balik dari hasil akreditasi\pada gilirannya akan bermanfaat dalam proses perbaikan mutu dari suatu satuan pendidikan[19].

Akreditasi UNGGUL (A) menjadikan MIN 2 Kota Palangka Raya jadi cerminan bagi sekolah/madrasah yang berada di kota Palangka Raya untuk mengikuti jejak dan proses dalam hal Akreditasi sekolah/madrasah. Tidak sedikit pihak sekolah/madrasah lain melakukan pertemuan dengan Kepala Madrasah untuk berdiskusi bahkan meminta saran untuk pengAkreditasian sekolah/madrasah.

4. KESIMPULAN

Akreditasi dapat mendorong madrasah memenuhi akuntabilitas publik terhadap penyelenggaraan pendidikan. Hal ini disebabkan karena madrasah secara moral memiliki tanggung jawab secara langsung terhadap masyarakat sekitarnya mengenai pelaksanaan program pendidikannya. Akreditasi madrasah dapat menjadi ukuran keberhasilan atau tidaknya pengelola madrasah dan di mana letak kekurangan yang terjadi selama ini. Akreditasi madrasah dapat membantu pengelola madrasah untuk lebih fokus dalam tugas mengelola madrasah. Akreditasi sekolah adalah sarana untuk melakukan upaya upaya yang terus-menerus dalam meningkatkan kekuatan-kekuatan yang dimiliki sekolah serta memperbaiki kelemahan yang dimiliki. Proses akreditasi terhadap sekolah harus sampai pada titik membuka dan memberikan keyakinan kepada peserta didik khususnya dan pada masyarakat pada umumnya, dimana sekolah telah akan melaksanakan berbagai program kerja sekolah dengan sumber daya yang dimilikinya baik manusia maupun sumber daya lainnya secara sungguh-sungguh agar terjadi proses pendidikan yang bermutu dan menghasilkan keluaran yang bermutu pula. Sekolah sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional dituntut untuk selalu berupaya meningkatkan kualitas dalam penyelenggaraan pendidikan, hingga dapat menghasilkan lulusan yang berkualitas, mampu bersaing serta mampu menghadapi tantangan zaman. Akreditasi di MIN 2 Kota Palangka Raya mendapatkan nilai UNGGUL (A), menjadikannya memiliki nilai tersendiri terhadap dunia Pendidikan terutama di Kota Palangka Raya dan menjadi acuan bagi sekolah/madrasah lain untuk mengmbangkan Akreditasi hingga mendapatkan nilai (A). Karena sekolah/madrasah yang memiliki Akreditasi UNGGUL (A) bisa menjadikan sekolah/madrasah tersebut tujuan orang tua untuk anak menempuh awal jenjang Pendidikan yang sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan.

UCAPAN TERIMAKASIH

Terimakasih kepada semua pihak yang sudah terkait dalam penelitian ini yang sudah mensupport dan membimbing penulis hingga artikel ini terbit nantinya. Tidak lupa penulis juga mengucapkan kepada pihak MIN 2 Kota Palangka Raya yang sudah memberikan data dan juga berkenan menjadi objek penelitian ini. Penulis berharap penelitan ini bisa bermanfaat untuk pembaca.

REFERENCES

- [1] A. A. R. Awaludin, "Akreditasi Sekolah sebagai Suatu Upaya Penjaminan Mutu Pendidikan di Indonesia," *SAP (Susunan Artik. Pendidikan)*, vol. 2, no. 1, pp. 12–21, 2017, doi: 10.30998/sap.v2i1.1156.
- [2] *Undang-undang (UU) Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional*. Indonesia, 2003, p. 37. [Online]. Available: <https://peraturan.bpk.go.id/details/43920/uu-no-20-tahun-2003>
- [3] C. D. Setyaningsih, "Status Akreditasi Dan Kualitas Sekolah Di Sekolah Dasar Negeri," *J. Manaj. dan Supervisi Pendidik.*, vol. 1, no. 2, pp. 138–145, 2017, doi: 10.17977/um025v1i22017p138.
- [4] I. W. Wene and R. Muljani, "English Teachers' Performance Evaluation as a Means for Their Professional Developments," *Indones. Res. J. Educ. [IRJE]*, vol. 4, no. 2, pp. 483–497, 2020, doi: 10.22437/irje.v4i2.10167.
- [5] D. Asopwan, "Studi Tentang Akreditasi Dalam Meningkatkan Produktivitas Sekolah," *Indones. J. Educ. Manag. Adm. Rev.*, vol. 2, no. 2, pp. 264–271, 2018.
- [6] D. D. Marpaung, S. Miru, and B. Hasanuddin, "the Influence of Leadership and Motivation on the Performance of Civil Servants At Palu Courthouse Central Sulawesi," *Tadulako Int. J. Appl. Manag.*, vol. 3, no. 2, pp. 1–7, 2021, doi: 10.59769/tajam.v3i2.6.
- [7] S. Damayanti, E. Harapan, and R. Rohana, "Pengaruh Kepemimpinan Visioner dan Mutu Tata Kelola Terhadap Akreditasi," *J. Pendidik. Tambusai*, vol. 5, no. 3, pp. 10776–10784, 2021, [Online]. Available: <https://jptam.org/index.php/jptam/article/view/2711>
- [8] *SK Mendiknas No. 087/U/2002 tentang Pedoman Akreditasi Sekolah*. Indonesia, 2002.
- [9] D. S. Charismana, H. Retnawati, and H. N. S. Dhewantoro, "Motivasi Belajar Dan Prestasi Belajar Pada Mata Pelajaran Ppkn Di Indonesia: Kajian Analisis Meta," *Bhineka Tunggal Ika Kaji. Teor. dan Prakt. Pendidik. PKn*, vol. 9, no. 2, pp. 99–113, 2022, doi: 10.36706/jbti.v9i2.18333.
- [10] W. Kogoya and H. Uruwaya, "Pendampingan Penggunaan Iasp2020 Untuk Meningkatkan Kelayakan Akreditasi Sekolah Di Sma Yppk Asisi Sentani Tahun 2021," *J. Pengabd. Masy. Pemberdayaan, Inov. dan Perubahan*, vol. 2, no. 1, 2022, doi: 10.59818/jpm.v2i1.182.
- [11] D. Astenia, Rugaiyah, and N. Karnati, *Evaluasi Pelaksanaan Program Akreditasi Sekolah/Madrasah*. 2020.
- [12] D. Iskanto, Jeli Nata Liyas, Elida Gultom, P. B. Ansori, Y. Harwina, and T. Hendra, "Pelaksanaan Proses Akreditasi Sekolah untuk menjaga kualitas Pendidikan Sekolah/Madrasah," *J. Pengabd. Masy. Akad.*, vol. 1, no.



- 2, pp. 46–51, 2022, doi: 10.54099/jpma.v1i2.132.
- [13] PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL NOMOR 63 TAHUN 2009 TENTANG SISTEM PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN. Indonesia, 2009.
- [14] L. Azizah and S. Witri, “Peningkatan Mutu Pendidikan melalui Penerapan Total Quality Management dalam Program Akreditasi Sekolah,” *Dawuh Guru J. Pendidik. MI/SD*, vol. 1, no. 1, pp. 69–78, 2021, doi: 10.35878/guru.v1i1.263.
- [15] E. Muslihah, E. Syarifudin, Budiarjo, Nurlelah, and P. Mulyosaputro, “Akreditasi Sebagai Upaya Penjaminan Mutu pendidikan di Madrasah,” *J. PARIS LANGKIS J. Pendidik. Pancasila dan Kewarganegaraan*, vol. 5, no. 1, p. 134, 2024, [Online]. Available: <https://e-journal.upr.ac.id/index.php/parislangkis%0AAKREDITASI>
- [16] A. Afridoni, S. Putra, S. Hasri, and S. Sohiron, “Manajemen Akreditasi Sekolah Upaya Peningkatan Mutu Pendidikan,” *J. Pendidik. Tambusai*, vol. 6, no. 3, pp. 13832–13838, 2022, doi: 10.31004/jptam.v6i3.4402.
- [17] H. Huges, I. Wasliman, and E. Dianawati, “Implementasi kebijakan akreditasi madrasah dalam meningkatkan mutu kinerja,” *JRTI (Jurnal Ris. Tindakan Indones.*, vol. 8, no. 1, p. 15, 2023, doi: 10.29210/30032504000.
- [18] M. A. Adha, C. Benyamin, I. Octaviarnis, and D. Thalib, “Peran Akreditasi Dalam Penjaminan Mutu Pendidikan Di Sekolah Dasar,” *Media Manaj. Pendidik.*, vol. 2, no. 2, p. 270, 2019, doi: 10.30738/mmp.v2i2.5780.
- [19] M. Solichin, “Imlementasi Kebijakan Pendidikan dan Peran Birokrasi,” *J. Stud. Islam*, vol. 6, no. 2, pp. 148–178, 2015.